

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi di kota-kota besar termasuk yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kota dengan luas wilayah 32,50 km² dan jumlah penduduk 489.000 jiwa membuat Kota Yogyakarta tergolong sebagai Kota yang padat penduduk (BPKP, 2018). Pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara alamiah di mana kebutuhan masyarakat akan berbagai fasilitas seperti perumahan, sarana dan prasarana perbelanjaan, hiburan, transportasi serta fasilitas publik lainnya semakin tinggi (BPBD Purwakarta, 2017). Dengan keadaan tersebut perkotaan memiliki masalah-masalah utama yang membutuhkan perhatian lebih dan salah satunya adalah kebakaran.

Perumahan menempati urutan tertinggi dalam hal kejadian kebakaran di Indonesia. Selain karena beban api yang tinggi juga disebabkan oleh kepadatan bangunan. Kebakaran jenis ini umumnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penghuninya bahkan tidak jarang mengakibatkan korban jiwa (Wirawibawa, 2005).

Kebakaran dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa bisa diprediksi kejadiannya, namun kepedulian masyarakat termasuk pemilik dan pengguna gedung terhadap masalah proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa masih dikatakan rendah (BPBD Purwakarta, 2017). Bencana kebakaran banyak

disebabkan karena kelalaian individu yang kurang berhati-hati dalam memeriksa keamanan aliran listrik sehingga terjadi konsleting dari yang semula percikan api ringan dan tidak ditangani membuat api semakin melebar dan membesar. Selain faktor arus listrik, kebakaran yang terjadi di pemukiman penyebab utamanya berasal dari kompor, hubungan pendek arus listrik, trafo meledak, gas bocor ataupun hal lain yang berpotensi menjadi sumber api. Adapun faktor alam, yaitu musim kemarau juga dapat meningkatkan potensi kebakaran. Barang-barang menjadi lebih mudah terbakar karena kering, suhu udara saat musim kemarau cukup panas pada siang hari dan bisa terus meningkat karena adanya pergerakan semu matahari ke selatan. Perilaku masyarakat yang membakar sampah secara sembarangan juga bisa menimbulkan kebakaran (antaranews.com).

Demikian pula di Kota Yogyakarta, pada musim kemarau suhu udara dapat mencapai 35 derajat celcius. Kenaikan suhu ini diperparah dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan polusi di Kota Yogyakarta sehingga menjadikan Kota Yogyakarta tidak lagi teduh. Dengan semakin meningkatnya suhu udara, jika terdapat perilaku masyarakat yang memancing timbulnya sumber api maka akan berpotensi menimbulkan bencana kebakaran.

Adapun penyebab terjadinya kebakaran menurut (Hargiyarto, 2003) yaitu:

- 1) Kebakaran karena sifat kelalaian manusia, seperti tidak adanya informasi mengenai penanggulangan bahaya kebakaran, kurangnya rasa kehati-hatian saat menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan api, serta rendahnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin.
- 2) Kebakaran karena peristiwa alam. Jenis kebakaran ini terutama berkenaan dengan cuaca, sinar matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin dan topan.
- 3) Kebakaran karena penyalaan sendiri.

Kebakaran ini sering terjadi pada gudang bahan kimia yang bereaksi dengan udara, air dan juga dengan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak atau terbakar. 4) Kebakaran karena kesengajaan untuk tujuan tertentu, misalnya sabotase, mencari keuntungan ganti rugi klaim asuransi, hilangkan jejak kejahatan, tujuan taktis pertempuran dengan jalan bumi hangus.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (dalam Simangunsong, 2017) kebakaran yang terjadi pada tahun 2011, terjadi sebanyak 16.500 kebakaran di 498 kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Di Medan kebakaran terjadi sebanyak 163 kali, Surabaya 187 kejadian, Bandung 163 kali, Bekasi 127 kali, Depok 124 kali, dan Tangerang 167 kali..

Pada tahun 2015, kerugian dari kebakaran di DIY mencapai Total Rp2,04 Miliar. Kebakaran ini terdiri dari kebakaran rumah rakyat sebanyak 25 kebakaran, kebakaran pada perusahaan toko sebanyak 16 kebakaran, dan 17 kebakaran pada kendaraan. Sementara itu, kebakaran pada sektor lain-lain yang tidak teridentifikasi dalam kategori benda terbakar, sebanyak 49 kebakaran (harianjogja.com).

Dari berita di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar kebakaran di Kota Yogyakarta menimpa tempat tinggal. Jarak bangunan di dalam suatu perumahan dapat dikatakan rapat, dinding rumah bersatu dengan rumah di sebelahnya. Hal ini memang umum terjadi pada perumahan yang dibangun di daerah perkotaan. Jarak yang ada hanya terlihat pada jalan-jalan atau gang. Perencanaan seperti ini dilakukan karena keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan di daerah perkotaan sehingga harga bangunan beserta tanahnya dapat terjangkau oleh konsumen yang berpenghasilan menengah (Wirawibawa, 2005). Kerapatan bangunan yang padat

akan menyebabkan api menjalar dengan mudah ke rumah di sekitarnya begitupun dengan material yang digunakan pada bangunan juga akan berpengaruh. Jika bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah terbakar seperti triplek, plastik dan kayu maka akan mempercepat penyebaran sumber api. Namun jika bahan material yang digunakan adalah aluminium, besi, dan batu bata maka akan memakan waktu lebih lama untuk api dapat menyebar ke pemukiman di sekitarnya.

Dengan kondisi tersebut, jika terjadi kebakaran di salah satu bangunan bukan tidak mungkin dapat memusnahkan semua bangunan yang lainnya. Hal seperti ini tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak termasuk petugas pemadam kebakaran, pemerintah dan sudah tentunya penduduk di dalam perumahan (Wirawibawa, 2005).

Angka kebakaran di Indonesia masih sangat tinggi, dibandingkan tingkat kebakaran yang terjadi di luar negeri. Penyebabnya dari segi fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya kemampuan personil pemadam kebakaran. Hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan (Adelberty, 2014). Ditambah lagi dengan tidak tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap hunian maupun gedung atau yang lebih dikenal dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga menjadi salah satu kendala dalam menangani kebakaran. Urgensi dari keberadaan APAR akan sangat berpengaruh dalam menanggulangi kebakaran. Alat yang digunakan saat kebakaran pertama kali terjadi ini dapat memadamkan sumber api dengan cepat dan tuntas sehingga tidak perlu mengandalkan petugas pemadam kebakaran untuk sampai ke lokasi jika timbul potensi sumber api yang mungkin membesar.

Adapun di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mengalami bencana kebakaran dengan data sebagai berikut :

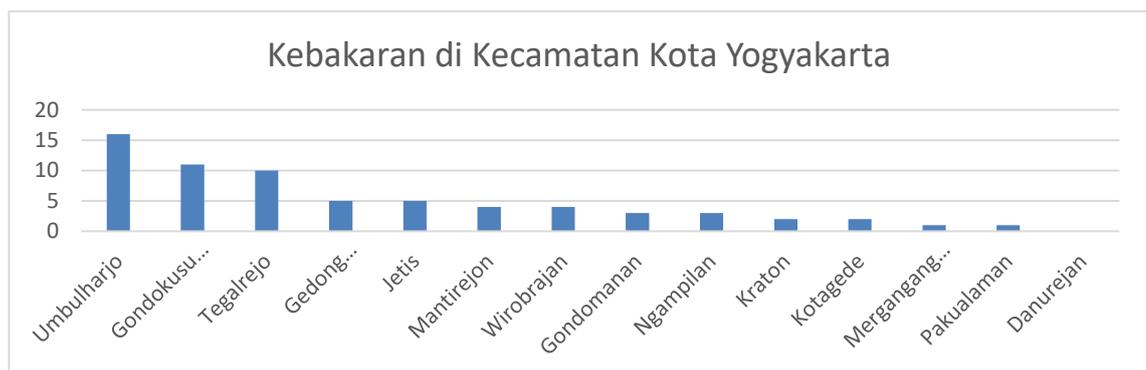
Tabel 1. 1 Angka/data kejadian di Kota Yogyakarta
periode 1 Januari-30 November 2017

No	Kejadian	Dalam Kota	Luar Kota	Jumlah
1	Pemadaman	67	75	142
2	Evakuasi	27	8	35
3	Penyiraman	7	-	7
4	Pengamanan	33	-	33
	Jumlah Total	134	83	217

sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, 2017

Grafik 1. 1

**Angka/data kejadian kebakaran per-kecamatan Kota Yogyakarta periode
1 Januari-30 November 2017**



Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta,2017

Tabel 1. 2

Angka/data penyebab kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta periode

1 Januari-30 November 2017

NO	Kejadian	Jumlah
1	Konsleting listrik	35
2	Kebocoran gas	9
3	Pembakaran sampah	6
4	Cairan mudah terbakar	2
5	Puntung rokok	1
6	Belum diketahui	14
	Jumlah Total	67

Sumber : Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta,2017

Masalah kebakaran yang terjadi memerlukan perhatian terhadap 2 aspek pokok yakni aspek pencegahan dan penanggulangan, kedua aspek ini bertujuan agar dapat menjamin keselamatan warga negara dan meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Dalam aspek pencegahan kebakaran, hal yang perlu diketahui adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran. Karena dengan mengetahui aspek pencegahan kebakaran dapat menurunkan terjadinya angka kebakaran di suatu wilayah dengan potensi kebakaran tinggi seperti di Kota Yogyakarta.

Sedangkan dalam aspek penanggulangan, upaya yang dilakukan adalah dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran. Hal ini perlu dipahami agar bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan pengaruh terkena pancaran api sejak awal terjadi hingga ketika menimbulkan

kebakaran dapat diketahui penyebabnya sehingga dapat menurunkan resiko kerugian dan memprioritaskan aspek keamanan.

Namun banyak kendala yang dialami saat petugas dinas pemadam kebakaran menjalankan tugas pemadaman, baik itu dalam peran pencegahan maupun penanggulangan masih dikatakan belum mencapai target yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kebakaran yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Terdapat beberapa pendapat terkait peran pemerintah. Dalam hal ini dikhususkan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Menurut Abdulsyani (dalam Sofian, 2017) peranan adalah suatu perbuatan sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang mempunyai peran tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan yang menimbulkan suatu harapan-harapan baru.

Sedangkan menurut Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri : 1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan. 2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran). 4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 5. Peran masyarakat sebagai subyek.

Dari beberapa penelitian di atas penulis mengambil teori peran menurut Kuncoro (2004:113) yang mengemukakan peran pemerintah mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

Berdasarkan hal di atas, yang menarik untuk di teliti adalah apakah bencana kebakaran di Kota Yogyakarta terjadi karena belum optimalnya peran Dinas kebakaran sebagai unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Maka, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai **PERAN DINAS KEBAKARAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENCEGAHAN DAN MENAGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2017** karena pada tahun tersebut bencana kebakaran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kota Yogyakarta. Untuk melengkapi penelitian ini penulis juga akan menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas kebakaran di Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

“Bagaimana Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Kebakaran Pada Tahun 2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Yogyakarta tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Yogyakarta tahun 2017 memiliki manfaat yang meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Yogyakarta tahun 2017 diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan analisis kerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam menangani suatu bencana terutama kasus kebakaran di Kota Yogyakarta dan sebagai acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pengalaman dan pengetahuan baru bagi masyarakat Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran yang mungkin terjadi di lingkungan Kota Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya ilmiah untuk pelengkap tugas akhir yang peneliti lakukan, juga sebagai suatu sumbangsih kecil

sebagai wujud syukur dapat melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi karya ilmiah yang membahas Peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Yogyakarta.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam membuat skripsi ini, peneliti telah mengumpulkan referensi bahan bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti telaah. Diantaranya:

Penelitian pertama, berjudul “Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Palupi Parameswari, Herbasuki Nurcahyanto, Rihandoyo dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif karena secara jelas menjelaskan kejadian di tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Kebakaran Kota Semarang dilihat dari dimensi masukan (input), kualitas layanan, efektivitas, dan responsivitasnya. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebakaran Kota Semarang. Setelah diketahui faktor sebelumnya, tujuan dari penelitian tersebut adalah merumuskan solusi yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi pada Dinas Kebakaran Kota Semarang. Isi dari penelitian ini menjelaskan Masukan (input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan dan menghasilkan keluaran (output). Dalam aspek input, ditemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebakaran Kota Semarang masih belum optimal baik kuantitas dan kualitasnya. Personil yang masih kurang mengakibatkan penanganan kebakaran tidak maksimal. Dari segi layanan, bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebakaran Kota Semarang yaitu penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran, perijinan dan pengawasan kelayakan keamanan gedung dari bahaya kebakaran. Sementara dari segi efektivitas, dijelaskan bahwa standar waktu penanganann kebakaran dari pos pemadam ke tempat kejadian perkara (TKP) adalah 15 menit, namun petugas karena beberapa hambatan yang ditemukan saat perjalanan membuat terlambat dalam penanganan kebakaran hingga 1 jam. Dari segi responsivitas, bertujuan agar suatu organisasi dapat mengetahui aspirasi masyarakat. Namun, Dinas Kebakaran Kota Semarang tidak memiliki forum untuk menampung aspirasi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat tidak diketahui dan hasil menjadi tidak maksimal. Dari banyaknya faktor penghambat yang telah disebutkan, Dinas Kebakaran Kota Semarang memiliki faktor pendukung organisasi yaitu telah terjalinnya koordinasi di setiap bidang, namun kendala yang dijumpai adalah mengenai sarana prasarana yang menjadi penghambat tujuan organisasi.

Kedua, adalah penelitian berjudul “Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarijadi Bandung)” Oleh : Ida Bagus Gede Wirawibawa Mantra (2005). Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan kondisi penanggulangan kebakaran perumahan Sarijadi Bandung. Digambarkan secara umum bahwa di perumahan Sarijadi minim terjadinya kasus kebakaran, hal ini karena bahan bangunan dan

beban api bersifat rendah di daerah perumahan. Namun jika sampai kebakaran terjadi, akses yang dilalui tim pemadam akan sulit. Ketiadaan hidran dan sumber air di perumahan ini juga membuat resiko nilai kebakaran meningkat. hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk mengurangi resiko kebakaran adalah dengan menyediakan kebutuhan pemadam api, mengurangi jarak kerapatan antar rumah, ketersediaan akses untuk penanganan kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran dan juga penyediaan areal lapangan untuk manuver kendaraan petugas.

Ketiga, yaitu penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Semarang (Widayanto, Prima : 2016). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja tim pemadam dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2008 serta standar internasional NFPA 1001, NFPA 1500. Melalui penelitian ini di dapatkan bahwa Analisis kinerja tim (sumber daya manusia) pemadam kebakaran bidang operasional dan pengendalian meliputi; 1) klasifikasi, 2) kualifikasi, 3) perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia, 4) pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi sumber daya manusia/personil pemadam kebakaran menunjukkan bahwa 50% sesuai dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2009 dalam hal klasifikasi. 35,83% sesuai dengan permendagri No. 16 Tahun 2009 mengenai jabatan fungsional, 58,33% sesuai dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2009 mengenai perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia,

24,10% sesuai dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2009 sesuai dengan nalisis pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi SDM.

Keempat, penelitian berjudul “Analisis Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Pada Tahun 2008-2012” oleh : Yudhi Kuswandi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dinas terkait dan menjelaskan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru. Dari penelitian ini di dapatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas hambatan yang ditemui yaitu waktu dan kelancaran petugas menuju tempat kejadian perkara, sarana prasarana pemadam kebakaran yang kurang memadai, sikap petugas yang berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat, dan perlu dilakukan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan personil pemadam kebakaran.

Kelima, penelitian berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya”. Analisis ini diteliti oleh : Adelberty, Mertilinda. Dari penelitian ini didapatkan bahwa kualitas pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran di surabaya berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan pada umumnya belum terpenuhi secara optimal. Kelima dimensi tersebut yaitu: pertama, sikap petugas yang meliputi : kemampuan petugas, daya tanggap petugas, dan sikap petugas itu sendiri. Kedua, prosedur yang meliputi : kemudahan prosedur pelayanan. Ketiga, adalah perihal waktu yang meliputi : ketepatan waktu. Keempat, adalah perihal fasilitas yang meliputi : kelengkapan fasilitas-fasilitas (mobil/armada, sumber daya manusia, peralatan/kelengkapan kebakaran) dan kelengkapan fasilitas sesuai standar operasional prosedur. Kelima, adalah perihal

pelayanan yang meliputi : kepuasan pelayanan dan kesesuaian pelayanan dengan visi dan misi. Diantara kelima indikator tersebut peneliti mendapatkan bahwa yang mendapat nilai terendah dari jawaban kuisisioner informan adalah indikator kemudahan prosedur, daya tangkap, dan kepuasan pelayanan pelayanan yang tidak sesuai SOP. Rendahnya nilai tersebut bukan hanya berasal dari dinas terkait, namun juga dipengaruhi oleh sulitnya akses bagi pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan tersebut antara lain, kerumunan warga saat kebakaran terjadi, lalu lintas yang padat, informasi yang tidak akurat, akses masuk ke lokasi tempat kejadian perkara yang sempit seperti adanya gapura, gang, portal, polisi tidur yang tidak sesuai standarisasi sehingga menghambat petugas dalam memadamkan kebakaran.

Keenam, penelitian berjudul “Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gowa” yang diteliti oleh Mariana pada tahun 2016. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan responsivitas pelayanan pemadam kebakaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelayanan pemadam kebakaran kurang responsif terutama pada indikator sikap petugas, kemudahan prosedur, pelayanan sesuai SOP dan kepuasan pelayanan mendapatkan nilai rendah.

Ketujuh, jurnal berjudul Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat : Kajian Kualitatif pada Aparat Pemerintah dan LSM oleh Fatmah (2009), dalam jurnal ini dijelaskan bahwa angka kebakaran di Indonesia pada tahun 2006 di dominasi oleh masalah kelistrikan. kebakaran dapat dicegah dengan persiapan dini,

upaya tersebut dikenal dengan mitigasi. adapun makna mitigasi adalah upaya menurunkan resiko dari bahaya bencana. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai pentingnya urgensi mitigasi kesiapsiagaan kebakaran yang meliputi tujuan bersama dan dorongan yang memotivasi pencegahan kebakaran hal ini dapat diwujudkan dengan keinginan untuk terlibat dalam kegiatan relawan penyuluh lapangan. Bentuk upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan masyarakat meliputi simulasi, penyuluhan, dan pelatihan bahaya kebakaran, serta menjadi anggota Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR). salah satu keinginan masyarakat untuk mengenal balakar adalah ingin terlibat dalam menangani kebakaran namun motivasinya dapat dikatakan kurang dalam pra-kebakaran. Menjadi tenaga balakar juga tidak menjamin adanya bayaran jasa, hal ini membuat status orang-orang yang bekerja pada BALAKAR menjadi musiman. organisasi tidak berjalan dengan baik dan rekrutment sulit dilakukan. Kini, dengan perbaikan peraturan yang ada membuat masyarakat secara tidak langsung berperan aktif dalam upaya mitigasi kebakaran. Dukungan masyarakat terhadap BALAKAR turut menentukan kelancaran program di lapangan.

Kedelapan, kajian mitigasi bencana kebakaran di permukiman padat (studi kasus: kelurahan taman sari, kota bandung) oleh Furi Sari Nurwulandari. Secara garis besar, kajian ini membahas wilayah kajian mitigasi bencana Kebakaran di permukiman padat Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung yang terdiri dari 35 wilayah dan memiliki kasus kejadian kebakaran. Masyarakat di kelurahan tersebut memiliki potensi komunitas yang dapat dikembangkan diantaranya dengan 1) adanya inisiatif masyarakat dalam mensosialisasikan program siaga bencana melalui surat edaran dan pelatihan-pelatihan 2) Masyarakat menyediakan sarana

rumah tangga sebagai alat pencegah kebakaran lokal 3) keperdulian antar-warga, apabila terjadi kendala, sehingga memudahkan pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Rukun Warga (RW) 9, RW 16 dan RW 20 Kelurahan Tamansari, termasuk wilayah yang berisiko terhadap bencana kebakaran, karena wilayah ini memiliki riwayat kejadian kebakaran, serta memiliki sumber potensi api yang cukup tinggi yang berasal dari aktivitas lingkungan sekitar (adanya keberadaan SPBU dan pedagang gas dan BBM eceran. Berdasarkan skenario mitigasi yang dirumuskan untuk ketiga RW Kelurahan Taman Sari, maka secara umum dapat dilakukan pendekatan mitigasi dengan mempertimbangkan faktor pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan, pemulihan dan pembangunan.

Kesembilan, kajian pustaka melalui skripsi “Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Terhadap Arsip di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh Hana Rosila. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melakukan upaya penggandaan arsip dan mendigitalkan arsip guna melindungi arsip yang asli. Selain itu, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga mempersiapkan peralatan khusus kebakaran yakni APAR, hydrant, pendeteksi asap, ruangan tahan api, cctv dan pendingin ruangan. Hal yang ditemui di lapangan yaitu terdapat beberapa peralatan yang masih belum memenuhi standar pemasangan diantaranya

- 1) Pemasangan APAR yang tidak sesuai standar dimana seharusnya dipasang berjarak 20 meter namun hanya dipasang dengan jarak 7-10 meter. Hal tersebut menyulitkan pada saat timbul potensi api.
- 2) Hydrant masih belum memiliki instalasi untuk mengalirkan air
- 3) Keberadaan dari alat pendeteksi asap belum

pernah di uji coba 4) banyak staff yang belum paham mengenai mekanisme kerja peralatan-peralatan khusus kebakaran yang dimiliki, dalam hal ini berarti ditemui kendala SDM 4) manajemen kebakaran yang belum terstruktur dengan baik 5) belum adanya SOP dan tim khusus dalam menghadapi bencana kebakaran

Kesepuluh, adalah penelitian dengan judul “Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di PT.Inka (Persero) Madiun Jawa Timur” yang ditulis oleh Bramastya Kharisma Putra. Didalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, PT.INKA Madiun telah membentuk tim organisasi penanggulangan kebakaran dan merencanakan program pengendalian penanggulangan kebakaran dengan menyusun prosedur penanggulangan kebakaran, penyediaan jalur evakuasi, membentuk organisasi, serta pembinaan, pengawasan dan pelatihan mengevakuasi korban. Guna menunjang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, PT.INKA memiliki fasilitas penunjang meliputi APD, sarana komunikasi, alarm manual, orari dan HT. Adapun sarana kesehatan poliklinik yang di miliki PT. INKA bekerja sama dengan RSUD dr. Soedono Madiun dengan penyediaan P3K, dan sarana transportasi seperti mobil perusahaan dan ambulans. Penerapan jalur evakuasi di PT. INKA yaitu pihak dari K3LH telah mempersiapkan jalur maupun tempat evakuasi untuk semua orang di area perusahaan jika terdapat potensi timbulnya kebakaran. Tapi, jalur evakuasi ini belum efektif karena belum pernah dilakukan poses uji coba dan masih tahap pengembangan. Dari hal-hal diatas maka diperlukan evaluasi terhadap program pencegahan dan penaggulangan yang ada.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peran

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri : 1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan. 2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran). 4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 5. Peran masyarakat sebagai subyek.

Sedangkan Abdulsyani (dalam Trisnani, 2017) peranan adalah suatu perbuatan sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Kuncoro (2004:113) mengemukakan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. Adapun pengertian dari peran tersebut adalah :

- a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dikendalikan pemerintah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan, pembangunan, dan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk jeli dan pro-aktif dalam mengembangkan

bisnis daerah, memanfaatkan aset pemda, dan pemberdayaan masyarakat marginal.

b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam peran ini dapat melibatkan kelompok masyarakat.

c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan, dan penetapan peraturan.

d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan yang ada.

Menurut Sihombing (dalam Rahajeng, 2013) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Fasilitator pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, dapat menangkap aspirasi masyarakat, membuka jalan, membantu menemukan peluang, memberikan dukungan, meringankan beban pekerjaan masyarakat, menghidupkan

komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

b. Sebagai Pelayan Masyarakat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah perlu bertindak sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama

c. Sebagai Pendamping Pemerintah harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan

d. Sebagai Mitra. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

e. Sebagai Penyandang Dana. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

Scott et dalam Kanfer yang dikutip oleh Bintoro (2012) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: 1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya. 2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity) 4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. 5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Menurut tokoh politik Australia (Owen E Huges, 1994:81) menyatakan bahwa peran dalam Instrumen pemerintah adalah metode yang dibenarkan dalam beberapa cara yang digunakan untuk mengatur suatu mekanisme. Sebagian besar intervensi pemerintah dapat terjadi melalui empat instrumen yang tersedia yaitu :

(a) Kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah menetapkan kebijakan dengan menggunakan pajak warga negara untuk menjalankan program seperti layanan jalan raya, pendidikan, pertahanan, kesehatan dan berbagai program kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pemerintah tidak langsung menghabiskan dana yang

ada, tetapi dana tersebut di retribusikan untuk kebijakan yang lainnya.

(b) Subsidi, sebenarnya merupakan sub kategori penyediaan dan merupakan tempat pemerintah dalam membantu swasta menyediakan barang dan layanan publik yang dibantu oleh tangan pemerintah. Walaupun bagian pembayaran terdapat di pemerintah, namun administrasi berada di swasta. Dalam hal ini pemerintah melakukan monitoring untuk memastikan dana digunakan pada jalur yang tepat. Contoh peran dalam subsidi adalah penyediaan bus sekolah ataupun bus untuk perusahaan swasta.

(c) Produksi, dalam hal ini pemerintah memproduksi barang dan layanan untuk umum. Namun dalam hal ini dibedakan antara barang publik dan kebijakan pemerintah. Berbeda dengan kebijakan, dalam hal produksi tidak mengambil dana dari pemerintah, dan pengguna yang memakai layanan dikenakan biaya seperti yang dilakukan di sektor swasta.

(d) Peraturan, yang melibatkan penggunaan kekuatan koersif (akomodasi) negara untuk mengizinkan atau melarang kegiatan tertentu di privat ekonomi. Penggunaan ini bervariasi dari waktu ke waktu dan sesuai dengan yang khusus fungsi pemerintahan.

1.6.2 Pencegahan Kebakaran

Pencegahan kebakaran menurut (Alkon, 2007) merupakan upaya untuk menghindarkan terjadinya peristiwa kebakaran. Sebisa mungkin, langkah yang

ditempuh petugas damkar dalam mencegah kebakaran adalah bagian dari proses pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan pada alat yang mungkin menjadi sumber api maupun melalui sosialisasi pada masyarakat mengenai deteksi kebakaran dini dan cara penyelamatan diri.

Hargiyarto (2003) mendefinisikan pencegahan sebagai berikut: “mencegah kebakaran adalah dengan mencegah bertemunya salah satu unsur dari bahan yang dapat terbakar, suhu penyalaan/titik nyala dan zat pembakar (O₂ atau udara)”.

Suma'mur (dalam Iraniana, 2009) mengemukakan bahwa pencegahan kebakaran yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan.

1.6.3 Penanggulangan Kebakaran

Menurut pedoman induk pusat Kementerian Perhubungan, penanggulangan kebakaran adalah suatu usaha mengatasi terjadinya kebakaran yang didalamnya termasuk usaha pemadaman, usaha meminimalisir untuk mencegah kemungkinan meluasnya kebakaran, serta usaha mengevakuasikan karyawan serta menyelamatkan jiwa dan harta benda.

Penanggulangan kebakaran menurut keputusan menteri tenaga kerja R.I no.kep.186/men/1999 ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.

Menurut keputusan menteri PU No 11/KPTS/2000 penanggulangan kebakaran bangunan gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pengelola, penghuni, dan regu pemadam kebakaran terhadap tindakan pemadam yang dilakukan pada suatu bangunan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Sebuah konsep yang satu dengan yang lainnya, karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Apabila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.
 - a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dikendalikan pemerintah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan, pembangunan, dan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk jeli dan pro-aktif dalam mengembangkan bisnis daerah, memanfaatkan aset pemerintahan daerah, dan pemberdayaan masyarakat marginal.
 - b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam peran ini dapat melibatkan kelompok masyarakat.

- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan, dan penetapan peraturan.
 - d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan yang ada.
2. Pencegahan yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan. Suma'mur (dalam Iraniana, 2009)
 3. Menurut Pedoman Induk Pusat Kementerian Perhubungan, penanggulangan kebakaran adalah suatu usaha mengatasi terjadinya kebakaran yang didalamnya termasuk usaha pemadaman, usaha meminimalisir dalam mencegah kemungkinan meluasnya kebakaran, serta usaha mengevakuasikan korban serta menyelamatkan jiwa/harta benda.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan indikator-indikator untuk mengukur variabel penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Adapun definisi operasional dengan teknik dan langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1) Wirausaha

Dalam peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai

bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk tujuan yang bersifat ekonomi.

Hal ini diwujudkan dengan:

- a. Penyewaan Alat Pemadam Kebakaran

2) Koordinator

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran peran Dinas Kebakaran sebagai koordinator adalah sebagai pembuat strategi dan koordinasi dengan pihak lain. Hal ini diwujudkan dengan:

- a. Pengawasan dan Pemberian Bimbingan Mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- b. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait dan Lembaga Lainnya.

3) Fasilitator

Sebagai fasilitator Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta bertindak sebagai penyedia fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perbaikan lingkungan, dan perbaikan prosedur. Hal ini diwujudkan dengan:

- a. Membangun infrastruktur damkar
- b. Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

4) Stimulator

Dalam hal stimulator, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta melakukan usaha-usaha khusus dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini diwujudkan dengan:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- b. Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Metode dan jenis penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan hasil data berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian Peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran melakukan penelitian di Jl. Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara bertujuan agar memperoleh informasi langsung dengan objek yang di teliti. Menurut (Hazqon, 2017) teknik wawancara yang digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung dan informan tersebut dipilih berdasarkan bagian tugas pokok dan fungsi, juga mencakup wewenang dalam bidangnya tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah pengumpulan data dengan mengamati atau menganalisis data yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain terkait suatu subjek. Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa dokumen adalah sejumlah data dan fakta yang tersimpan dalam wadah yang berwujud dokumentasi (Hastin, 2018). Metode dokumentasi yang digunakan penulis yakni dengan mengutip wawancara dan menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengenai bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2017.

1.9.4 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2000) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap Aparatur Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yang terlibat di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Tanjung 2018 :42) dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan dokumen, catatan-catatan melalui tipe yang terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Serta terdapat penawaran pola umum analisis dengan mengikuti model sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan, dan pemindahan data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan, dengan itu reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Kesimpulannya reduksi data adalah

memfokuskan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. *Data Display*

Display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data *display* surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada di tangan peneliti. Proses sudah benar dan data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil dapat dipercayai. Serta reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori yang memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang judul penelitian.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan serta mempermudah arah terhadap penulis dalam penelitiannya.
4. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan *interview* dan menyusun data sekunder. Penulis dalam penelitian ini dapat merangkai data primer untuk menjadi pedoman dalam melakukan *interview* dan data sekunder menjadikan penelitian ini menjadi sempurna karena berisi mengenai dokumen-dokumen penting.
5. Klarifikasi data, memberikan panduan terhadap penulis untuk melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan. Karena dengan melakukan tahapan tersebut, dapat memberikan poin-poin jawaban yang bermanfaat. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam melanjutkan penelitian.

6. Setelah klarifikasi data, penulis akan mengolah data dengan baik. Karena tahapan ini sangat penting bagi penulis untuk dapat memberikan penjelasan terhadap penelitiannya. Penjelasan memberikan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada penelitian.
7. Dalam melakukan tahapan pengolahan data, penulis mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dilakukanya tahapan analisis data. Untuk analisis data penulis mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
8. Tahapan akhir, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang penelitian serta penulis memberikan argumentasi pada penelitian ini.